

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pencegahan pelanggaran Pemilu 2019 dan 2024 di Jawa Tengah telah mengalami perkembangan dengan pendekatan yang lebih sistematis melalui pemetaan potensi pelanggaran dan edukasi pemilih. Namun, efektivitasnya masih terbatas akibat rendahnya partisipasi masyarakat dan beberapa kendala teknis dalam pelaksanaannya.

Perbandingan penyelesaian tindak pidana dan administrasi menunjukkan bahwa pada Pemilu 2024 terjadi perubahan regulasi, seperti penghapusan sidang pendahuluan yang diganti dengan kajian awal selama dua hari pada penyelesaian pelanggaran administrasi, serta Pendampingan kepolisian dan kejaksaan dalam penyelesaian pelanggaran tindak pidana Pemilu mengalami perubahan dari wajib pada 2019 menjadi opsional pada 2024. Meskipun mempercepat proses, perubahan ini menimbulkan risiko terhadap selektivitas laporan yang masuk ke tahap pemeriksaan. Akan tetapi, kedua jenis pelanggaran diselesaikan dalam waktu 7+7 hari secara bergantian.

Penyelesaian pelanggaran Pemilu dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat. Dari sisi pendukung, kerangka hukum yang jelas, pemanfaatan teknologi informasi, serta partisipasi aktif masyarakat telah membantu memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum Pemilu. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat yang masih menjadi

tantangan, seperti perbedaan pemahaman di Sentra Gakkumdu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kendala teknis dalam sistem digital pengawasan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti memberikan beberapa saran, diantaranya sebagai berikut:

- i. Penguatan Sistem Pencegahan Pelanggaran

Program seperti pendidikan pemilih, sosialisasi intensif, dan pembentukan komunitas pengawasan di tingkat lokal menjadi langkah yang baik untuk pencegahan pelanggaran Pemilu, selanjutnya Bawaslu harus memperluas cakupan program untuk mencapai hasil yang lebih maksimal. Peneliti juga menyarankan agar Bawaslu mengoptimalkan media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pemilu yang jujur dan adil.

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu

Perlu adanya peningkatan kompetensi SDM di Bawaslu, khususnya di tingkat daerah, melalui pelatihan yang berkelanjutan tentang regulasi terbaru, teknik investigasi, dan penyelesaian pelanggaran. Upaya ini sangat penting untuk memastikan Bawaslu dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan responsif.

3. Meningkatkan Kerjasama dengan Pemangku Kepentingan

Kerjasama antara Bawaslu dengan institusi penegak hukum, media, masyarakat sipil, dan akademisi harus diperkuat untuk mendukung pencegahan dan penanganan pelanggaran secara komprehensif.

4. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Agar kepercayaan publik terhadap proses Pemilu meningkat, Bawaslu perlu memastikan transparansi dalam penanganan kasus pelanggaran dan menyampaikan informasi hasil tindak lanjut secara rutin kepada masyarakat.

5. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Perlu adanya mekanisme monitoring dan evaluasi berkala terhadap sistem pencegahan dan penanganan pelanggaran yang diterapkan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program, serta membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu yang profesional dan transparan.